



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YAHYA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 746154

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 803.350.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 524 m2/250 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 503.200.000
2. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
3. Tanah Seluas 32400 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 32.400.000
4. Tanah Seluas 4500 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, WARISAN Rp. 67.500.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 115 m2/100 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 170.250.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 106.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1.300 G Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO 28D Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 95.877.500

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 83.134

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.005.310.634

III. HUTANG Rp. 243.702.143

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 761.608.491



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Maret 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF**LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU****UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG****I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ADAM MALIK**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **847993**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 337 m2/135 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 158.000.000

1. MOTOR, HONDA NF 100SE Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, HONDA HONDA BEAT X1B02N04LO A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AGYA 1.2 G M/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 789.150.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 161.302.547**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 2.108.452.547**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.108.452.547**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANTONIUS BUDI**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **874345**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 825.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/224 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/72 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 4000 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 13.500.000

1. MOTOR, SUZUKI SHOGUN Tahun 2006, HIBAH TANPA AKTA Rp. 5.500.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 75.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 805.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 275.000.000

Sub Total Rp. 1.993.500.000

III. HUTANG Rp. 85.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.908.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD KHARBI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 733092

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 900.000.000

1. Tanah Seluas 1469 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 1210 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1248 m2/320 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 80.000.000

1. MOBIL, NISSAN LIVINA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 300.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.973.767

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.284.973.767

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.284.973.767

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 April 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYARIFUDIN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 902150

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.070.700.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1118 m2/258 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 1.070.700.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 295.000.000

1. MOBIL, TOYOTA XPANDER CROSSI Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
2. MOTOR, YAMAHA YAMAHA B3B A.T. Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 77.300.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 22.710.612

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.465.710.612

III. HUTANG Rp. 336.960.300

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.128.750.312

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TEODOLUS TEDDY HINGGAAN
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
3. NHK : 691934

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	100.000.000
1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2004, HASIL SENDIRI	Rp.	95.000.000
2. MOTOR, HONDA KARISMA Tahun 2004, HASIL SENDIRI	Rp.	5.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	177.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	14.503.639
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	292.003.639
III. HUTANG	Rp.	181.175.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	110.828.639

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.